

ANALISIS DIFUSI KERUANGAN di SEKITAR KAWASAN PERKOTAAN YOGYAKARTA



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh:

Arina Nurul Faizah

NIM. C2B309001

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2013

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Arina Nurul Faizah
Nomor Induk Mahasiswa : C2B309001
Fakultas : Ekonomika dan Bisnis/ IESP
Judul Skripsi : **ANALISIS DIFUSI KERUANGAN di SEKITAR
KAWASAN PERKOTAAN YOGYAKARTA**
Dosen Pembimbing : Drs R. Mulyo Hendarto, MSP

Semarang, 16 April 2013

Dosen Pembimbing,



(Drs. R. Mulyo Hendarto, MSP)
NIP. 19610416 198710 1001

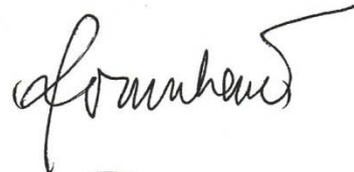
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Arina Nurul Faizah
Nomor Induk Mahasiswa : C2B309001
Fakultas / Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / IESP (Ilmu Ekonomi dan Studi
Pembangunan)
Judul Skripsi : ANALISIS DIFUSI KERUANGAN DISEKITAR
KAWASAN PERKOTAAN YOGYAKARTA

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 22 April 2013

Tim Penguji

1. Drs. R. Mulyo Hendarto., MSP
2. Dr. Nugroho SBM., MSP
3. Drs. Y. Bagio Mudaki.r, MSP


()
()

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Arina Nurul Faizah, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **ANALISIS DIFUSI KERUANGAN di SEKITAR KAWASAN PERKOTAAN YOGYAKARTA** adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 16 April 2013

Yang membuat pernyataan,



(Arina Nurul Faizah)

NIM : C2B309001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”

(Al-Mujadalah: 11)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Al-Insyiroh: 5)

**“ Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal,
tetapi bagaimana kita bangkit kembali setelah kita jatuh“**

(Confusius)

**Hasil skripsi ini tidak terlepas dari getaran do'a tulus kedua orang tua,
keluarga, dan orang-orang terkasih setiap detik waktu yang tiada henti**

Semangat dalam penyelesaian skripsi ini merupakan dukungan dan motivasi yang luar biasa dari teman-teman tercinta

ABSTRACTS

The rapid population growth in cities will lead to the increasing of the growth size of urban areas therefore it will generate the urban agglomeration afterwards. The urban areas tends to expand to the periphery area because of the lack of land supply in cities.

The urban size of Yogyakarta has experienced increased significantly. In this moment, the urban area of Yogyakarta has reached until Sleman regency and partly of Bantul regency. This study identify the phisical, social, economic transformation and also the spatial diffusion effect that has already occurred in urban area of Yogyakarta.

This study shows that the forming of urban area of Yogyakarta and surrounding gives impacts of phisical transformation such as the increasing of built area which generate the land prices rise and the infrastructure and social facility adequate in the periphery. The activity in city lead as the generator of the spatial diffusion to the periphery and also economic of scale which is the increase in efficiency of production as the number of goods being produced increases.

Keywords: population growth, urban size, urban area, spatial diffusion, economic of scale

ABSTRAK

Pertumbuhan Penduduk yang terus terjadi pada kota-kota besar yang terus tumbuh dan berkembang berpengaruh terhadap terjadinya perkembangan kota. Perkembangan kota akan menyebabkan terjadinya aglomerasi di kawasan perkotaan. Sempitnya lahan di pusat-pusat kota mengakibatkan penjalaran fisik kekotaan ke daerah pinggiran kota.

Kota Yogyakarta sebagai salah satu kota yang perkembangannya menjadi wilayah perkotaan mengalami proses pertumbuhan dari waktu ke waktu, dimana saat ini perkembangan Kawasan Perkotaan Yogyakarta telah meluas mencakup sebagian wilayah di Kabupaten Sleman dan sebagian wilayah di Kabupaten Bantul. Penelitian ini ditujukan untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan fisik, sosial ,ekonomi yang terjadi di Kawasan Perkotaan Yogyakarta dan dampak penyebaran dari adanya difusi keruangan di Kawasan Perkotaan Yogyakarta.

Hasil dari penelitian ini adanya penetapan kawasan perkotaan Yogyakarta yang meluas ke daerah sekitarnya memberikan perubahan-perubahan fisik ke daerah sekitarnya seperti semakin meluasnya area terbangun yang memberikan dampak terhadap nilai ekonomi lahan serta kelengkapan infrastruktur perkotaan, ketersediaan fasilitas sosial ekonomi di wilayah pinggiran kota Yogyakarta memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan kota. Keberadaan fasilitas pembangkit kegiatan memberi pengaruh terhadap dinamika aktivitas sosial ekonomi penduduk, dan *economic of scale* di Kawasan Perkotaan Yogyakarta.

Kata Kunci: Pertumbuhan penduduk, ukuran kota, urban area, difusi ruang, *economic of scale*

KATA PENGANTAR

Syukur *Alhamdulillah* penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Analisis Difusi Keruangan di Kawasan Perkotaan Yogyakarta**” Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan di lingkungan Universitas Diponegoro.

Dalam penulisan skripsi ini tidaklah luput dari berbagai kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan sebagai bahan pertimbangan dan perbaikan dalam penulisan selanjutnya.

Penulisan menyadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa peran serta langsung maupun tidak langsung pihak-pihak lain. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Drs. Mohammad Nasir, M.Si, Ak, Ph.D selaku dekan fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Bapak Drs R. Mulyo Hendarto, MSP sebagai dosen pembimbing yang telah bersedia membimbing dan mengajarkan seluruh informasi yang diperlukan untuk penelitian ini.
3. Bapak Maruto Umar Basuki, SE, M.Si. selaku Dosen Wali Universitas Diponegoro.
4. Ibu Evi Yulia Purwanti, SE., M.Si., selaku Sekertaris Jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan.
5. Seluruh Staf Pengajar/dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis yang telah memberikan segenap ilmunya kepada penulis, khususnya Staf Pengajar Jurusan IESP.

6. Kepala Bappeda Tingkat I Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta beserta staf karyawan atas keramahan dan informasi-informasi yang diberikan.
7. Kedua Orangtuaku tercinta Bapak Muhaji dan Ibu Siti Jamhariyah serta kakak-kakaku tersayang, atas segala kasih sayang, motivasi dan doa yang terus diberikan kepada penulis Terimakasih atas segala yang telah diberikan.
8. Mbak ari yang selalu memberikan semangat dan menjadi teman diskusi selama penulisan skripsi ini.
9. Philip, Ariska, Betty Rahayu, Elsa Bheta, Whisnu, Arjanggal, Pungki, Ilham, Zulham, Fery atas keramah-tamahan dan rasa kekeluargaan selama kuliah di IESP.
10. Teman-teman di jurusan IESP, angkatan 2006, 2007, 2008, 2009.
11. Teman-teman di Paradise Batik group, Ifa, Erna, Siti, Tia, Putri, Eka, Anita, Ari, yang telah memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini.
12. Semua pihak yang turut serta membantu penulis di segala bidang kehidupan yang tak dapat ditulis satu persatu.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya

Semarang, April 2013



Arina Nurul Faizah

NIM: C2B309001

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Pernyataan Orisinalitas Skripsi	iv
Motto dan Persembahan.....	v
<i>Abstract</i>	vi
Abstrak.....	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xiii
Daftar Gambar	xiv
Daftar Lampiran.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	16
1.3 Tujuan Penelitian	16
1.4 Manfaat Penelitian	16
1.5 Sistematika Penulisan	17
BAB II TELAAH PUSTAKA	18
2.1 Landasan Teori.....	18
2.1.1 Perencanaan Pembangunan Wilayah	18
2.1.2 Difusi Ruang	21
2.1.3 Faktor dan Pola Perkembangan kota.....	21
2.1.3.1 Fungsi Kota.....	25
2.1.3.2 Fasilitas yang Dibutuhkan dalam Satu Kota.....	27
2.1.4 Aglomerasi.....	27

2.1.5 Analisis dalam Wilayah Pengaruh	29
2.2 Penelitian Terdahulu	30
2.3 Kerangka Pemikiran.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1 Metode Dasar	38
3.1.1 Variabel Penelitian.....	38
3.2 Sumber Data.....	39
3.3 Metode Analisis	40
3.3.1 Tipe Penelitian.....	40
3.3.2 Alat Penelitian	41
BAB IV PEMBAHASAN.....	42
4.1 Kajian Umum Provinsi DIY.....	42
4.2 Kondisi Fisik Wilayah Perkotaan Yogyakarta	48
4.2.1 Kebijakan Pembangunan Kawasan Perkotaan di DIY.....	48
4.2.2 Wilayah Administratif Kawasan Perkotaan Yogyakarta	53
4.2.3 Tata Guna Lahan.....	57
4.2.4 Penggunaan Ruang.....	58
4.2.4.1 Penggunaan Untuk Jasa	59
4.2.4.2 Penggunaan Tanah untuk Ruang Terbuka	61
4.2.4.3 Penggunaan Lahan untuk Industri	62
4.3 Dampak Ekonomi Perubahan Tata Guna Lahan	64
4.4 Ketersediaan Fasilitas Perkotaan di Kawasan Perkotaan Yogyakarta	71
4.4.1 Fasilitas Sosial	71
4.4.1.1 Fasilitas Kesehatan	71
4.4.1.2 Fasilitas Pendidikan	74
4.4.1.3 Fasilitas Pemerintahan	77

4.4.2 Fasilitas Ekonomi.....	78
4.4.2.1 Perdagangan dan Jasa	78
4.4.2.2 Jasa Hotel.....	79
4.5 Prasarana Fisik Kawasan Perkotaan Yogyakarta	80
4.5.1 Fasilitas Transportasi	80
4.5.2 Fasilitas Pengelolaan Sampah.....	84
4.6 Interaksi Wilayah Pengaruh Pelayanan.....	84
BAB V PENUTUP	88
5.1 Kesimpulan	88
5.2 Keterbatasan.....	90
5.3 Saran.....	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DIY	
Tahun 2004 – 2008	2
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	32
Tabel 4.1 Laju Pertumbuhan Penduduk DIY Tahun 1999-2000, 2001-2010..	41
Tabel 4.2 Rata – Rata LQ Daerah Istimewa Yogyakarta	
Tahun 2001-2010	45
Tabel 4.3 Kelengkapan Fasilitas Kesehatan DIY	
Tahun 2009-2011	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Perencanaan Kawasan Perkotaan Yogyakarta	5
Gambar 1.2 Peta Perencanaan Pemanfaatan Ruang Yogyakarta	7
Gambar 1.3 Peta Pusat Pelayanan Kota Yogyakarta	8
Gambar 1.4 Peta Sistem Angkutan Kawasan Perkotaan Yogyakarta	11
Gambar 1.5 Peta Perencanaan Pengelolaan Sampah	12
Gambar 1.6 Peta Sistem Drainase	13
Gambar 2.1 Model Hirarki Tempat Sentral	
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran.....	
Gambar 4.1 Wilayah Administratif Daerah Istimewa Yogyakarta	47
Gambar 4.2 Pusat Kota Yogyakarta.....	50
Gambar 4.3 Peta Wilayah Administratif Kawasan Perkotaan Yogyakarta.....	56
Gambar 4.4 Peta Penggunaan Lahan Industri di Kabupaten Bantul.....	63
Gambar 4.5 Peta Penggunaan Lahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	64
Gambar 4.6 Perumahan Citra Grand Mutiara di Gamping Sleman	66
Gambar 4.7 Bangunan Hotel di Kawasan Perkotaan Yogyakarta	69
Gambar 4.8 Hotel dan Terminal di Jalan Lingkar Luar Perkotaan. Yogyakarta.....	70
Gambar 4.9 Fasilitas Kesehatan di Kawasan Perkotaan Yogyakarta	73
Gambar 4.10 Pusat Pelayanan Pendidikan dan Perdagangan di Jalan Lingkar Selatan.....	76
Gambar 4.11 Trayek Trans Jogja di Kawasan Perkotaan Yogyakarta.....	82
Gambar 4.12 Pusat Perekonomian di Jalan Wonosari, Brebah, Sleman.....	86

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A Hasil Analisis LQ

Lampiran B Data Neraca Penggunaan Lahan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan penduduk dalam suatu wilayah perkotaan selalu diikuti oleh peningkatan kebutuhan ruang kota. Kota sebagai perwujudan geografi selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Dua factor utama yang sangat berperan adalah faktor penduduk (demografis) dan faktor aspek-aspek kependudukan (Yunus, 1987). Dari segi demografi yang paling penting adalah segi kuantitas. Aspek kependudukan seperti aspek politik, sosial, ekonomi, dan teknologi juga selalu mengalami perubahan. Kuantitas dan kualitas kegiatannya selalu meningkat sejalan dengan penambahan penduduk perkotaan, sehingga ruang sebagai wadah kegiatan tersebut selalu meningkat sejalan dengan penambahan penduduk perkotaan.

Untuk kota yang sudah padat bangunannya, semakin berkembangnya penduduk yang tinggal di daerah perkotaan dengan segala aspek kehidupannya, yang berlangsung secara terus menerus akan mengakibatkan kota tidak lagi dapat menampung kegiatan penduduk. Oleh karena wilayah kota secara administratif terbatas, maka harus melihat wilayah pinggiran disekitarnya sebagai suatu kawasan peluberan kegiatan perkembangan kota. Akibat yang ditimbulkan oleh perkembangan kota adalah adanya kecenderungan pergeseran fungsi-fungsi kekotaan kewilayah pinggiran kota yang disebut dengan perembetan kenampakan

fisik kekotaan kearah luar. Akibat selanjutnya di wilayah pinggiran kota akan mengalami proses transformasi baik dari segi ekonomi maupun sosial.

DIY adalah propinsi yang unik secara demografik. Jumlah penduduk DIY hanya sekitar 3,4 juta jiwa pada tahun 2008 dan memiliki angka pertumbuhan penduduk 0,73%, yang paling rendah di Indonesia. Dengan sekitar 64,30% penduduk tinggal di wilayah perkotaan dan 35,70% tinggal di pedesaan. DIY merupakan provinsi dengan penduduk paling padat kedua di Indonesia setelah DKI Jakarta dimana kepadatan tertinggi berada di Kota Yogyakarta yakni 14.059 jiwa per km² dengan luas wilayah yang hanya 1% dari luas wilayah Provinsi DIY.

Tabel 1.1
Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DIY
Tahun 2004 - 2008

Kab/Kota	Luas Area(Ha)	KepadatanPenduduk (jiwa/km ²)				
		2004	2005	2006	2007	2008
Kabupaten Kulonprogo	586.27	637	638	638	639	639
Kabupaten Bantul	506.85	1.682	1.719	1.744	1.770	1.795
Kabupaten Gunungkidul	1485.4	457	459	460	461	462
Kabupaten Sleman	574.82	1.704	1.739	1.763	1.786	1.810
Kota Yogyakarta	32.5	13.253	13.520	13.700	13.881	14.059
DIY	3185.8	17733	18075	18305	18537	18765

Sumber: DIY Dalam Angka 2009

Dilihat dari kepadatan penduduk, Kota Yogyakarta memiliki kepadatan tertinggi 14.059 jiwa/km² pada tahun 2008 diikuti Kabupaten Sleman dan kabupaten Bantul. Kepadatan Penduduk yang tinggi di wilayah kota Yogyakarta sebagai pusat perkotaan menyebabkan pemekaran kawasan perkotaan di sekitar wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Sargent (1976), salah satu dari lima

kekuatan yang menyebabkan terjadinya pemekaran kota secara fisik yaitu peningkatan jumlah penduduk.

Kota Yogyakarta yang dikenal sebagai pusat kebudayaan, pusat pemerintahan, daerah pariwisata, dan kota pelajar senantiasa berkembang dari waktu ke waktu. Perkembangan secara terus menerus ini mengakibatkan wilayah yang langsung berbatasan dengan Kota Yogyakarta telah banyak mendapat pengaruh kota. Perkembangan fungsi kota Yogyakarta yang semakin tinggi intensitasnya dihadapkan pada keterbatasan lahan yang mengakibatkan sulitnya memperoleh lahan untuk mewadahi tuntutan kehidupan kota. Sebagai kota kebudayaan dan pariwisata dengan terdapatnya kawasan yang mempunyai nilai sejarah dan budaya maka kawasan tersebut perlu dilestarikan, dengan demikian perkembangan kota Yogyakarta akhirnya mengarah ke wilayah pinggiran kota, yang secara administratif termasuk dalam wilayah Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman (Sontosudarmo, 1987).

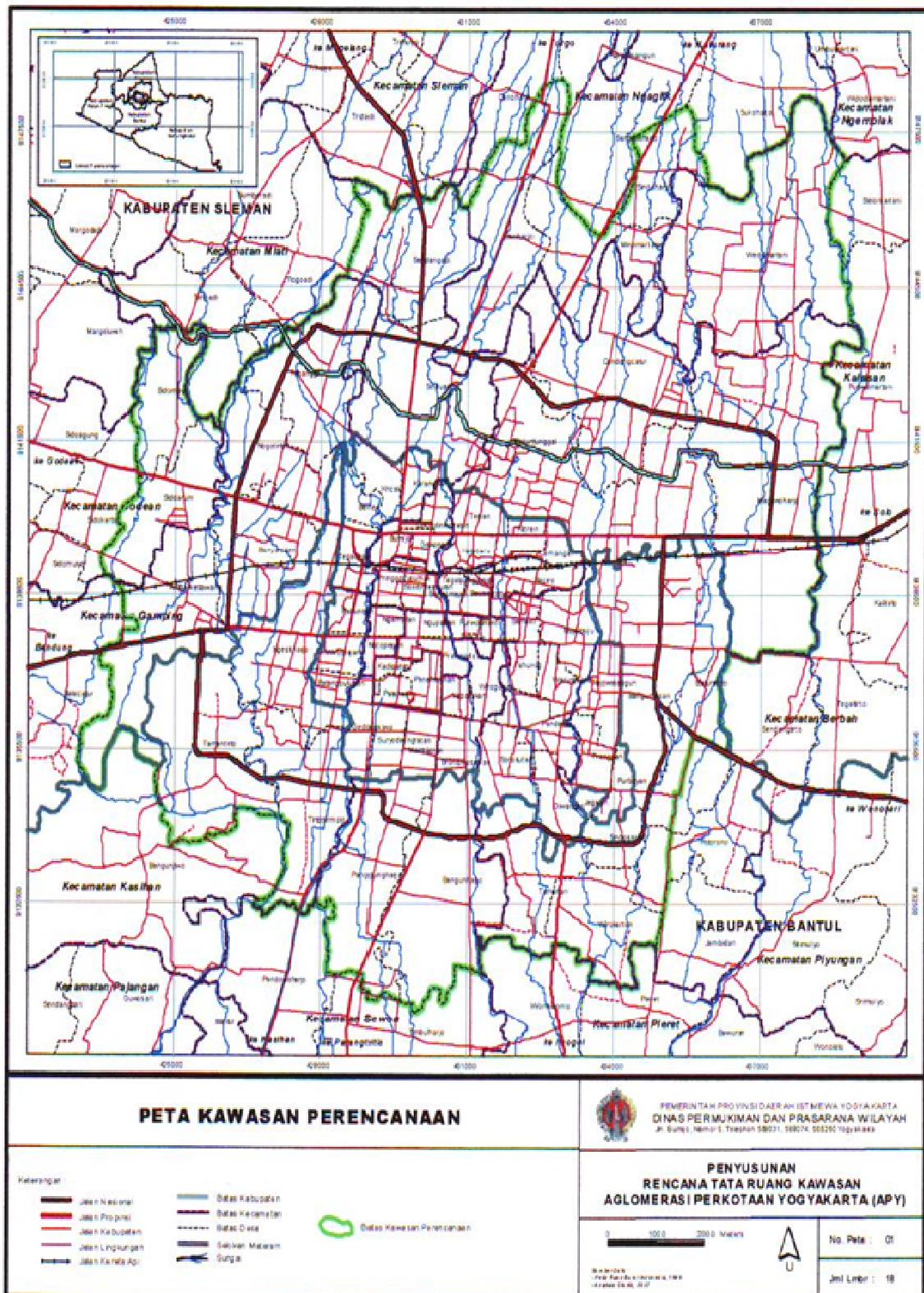
Wilayah Perkotaan Yogyakarta mulai dikenal sejak dilakukan studi tentang Pengembangan Perkotaan Yogyakarta yang lebih dikenal dengan *Yogyakarta Urban Development Project* tahun 1990. Wilayahnya mencakup Kota Yogyakarta, sebagian wilayah Kabupaten Sleman dan sebagian lagi dari wilayah Kabupaten Bantul. Kriteria Penetapan wilayah perkotaan ini menggunakan pedoman dari *Nasional Urban Development Strategy* (NUDS) 1985, yang antara lain bisa dicapai 60 menit dengan bersepeda atau 120 menit dengan berjalan kaki dan berada pada radius 10 kilometer dari pusat kota. Wilayah perkotaan dalam radius 10 km dari pusat kota Yogyakarta tersebut mempunyai kapasitas yang cukup

memadai untuk menampung proyeksi peningkatan penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang diperhitungkan dalam beberapa dekade mendatang. Oleh karena itu sejumlah kelurahan/desa di Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Bantul yang terletak dalam radius 10 km dari pusat kota dikembangkan sebagai wilayah perkotaan Yogyakarta. Dalam buku “Agenda Profil Penataan Ruang Wilayah Perkotaan Yogyakarta 2003”, disebutkan bahwa Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman merupakan wilayah pengembangan Aglomerasi Perkotaan. Kedua Kabupaten ini memiliki fungsi sebagai bagian pusat pengembangan Aglomerasi Perkotaan regional DIY.

Wilayah yang memiliki potensi untuk berkembang pada awalnya kawasan utara yakni wilayah Kabupaten Sleman, perkembangan terjadi sebagai akibat dari penempatan kawasan pendidikan, perumahan dan jasa. Selanjutnya pada dekade terakhir perluasan wilayah kota diarahkan ke bagian selatan atau wilayah Kabupaten Bantul, dengan menempatkan kawasan pendidikan, perumahan, perdagangan dan jasa lainnya di wilayah selatan perkotaan Yogyakarta.

Mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DI Yogyakarta No. 10 Tahun 2005, pada Pasal 41c, Kawasan Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta (KPY) mempunyai fungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang mencakup wilayah kota Yogyakarta dan sebagian wilayah kecamatan Kasihan, Sewon, Banguntapan di wilayah Kabupaten Bantul serta Kecamatan Depok, Ngemplak, Ngaglik, Mlati dan Gamping di wilayah Kabupaten Sleman. Wilayah ini merupakan wilayah pengembangan sistem pelayanan Kota Yogyakarta.

Gambar 1.1
Peta Perencanaan Kawasan Perkotaan Yogyakarta



Sumber: Dinas Permukiman dan Sarana Wilayah Provinsi DIY

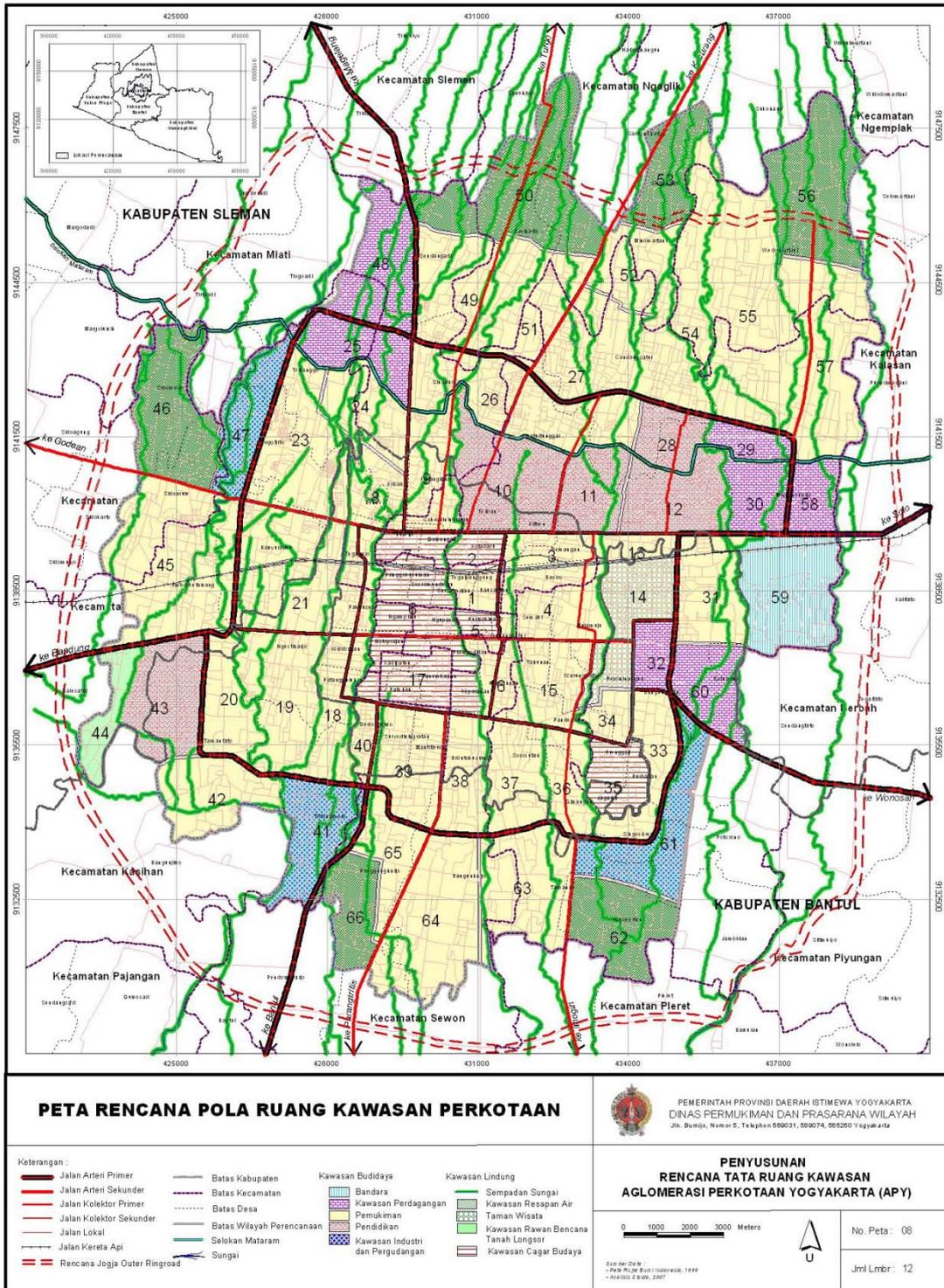
Kawasan Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta memiliki beragam pusat aktivitas kota mulai perkantoran, komersial, kebudayaan sampai fungsi pendidikan. Di sektor perumahan, secara langsung penyediaan perumahan kampung tradisional menjadi pendukung tumbuhnya fungsi di tengah kota. Kebutuhan rumah tahun 2007 adalah 108.256 unit, sedangkan ketersediaan rumah 78.482 unit hanya memenuhi 72,50 kebutuhan rumah (backlog 27, 50%). Kondisi rumah layak huni 54 % unit dan tidak layak huni 46 % dengan kepadatan penduduk 16.262 jiwa/km² (Buwono X dalam Kuncoro, 2011).

Dengan adanya berbagai pusat aktivitas di kawasan perkotaan Yogyakarta maka dalam hal ini pemerintah Provinsi DIY membuat suatu perencanaan tersendiri untuk tata ruang Kawasan Perkotaan Yogyakarta , yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 2 Tahun 2010. Arah kebijakan pembangunan kawasan perkotaan Yogyakarta meliputi beberapa hal yakni pengendalian pemanfaatan ruang, ketersediaan sarana dan prasana fisik kota.

Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan koridor perkotaan ini adalah :

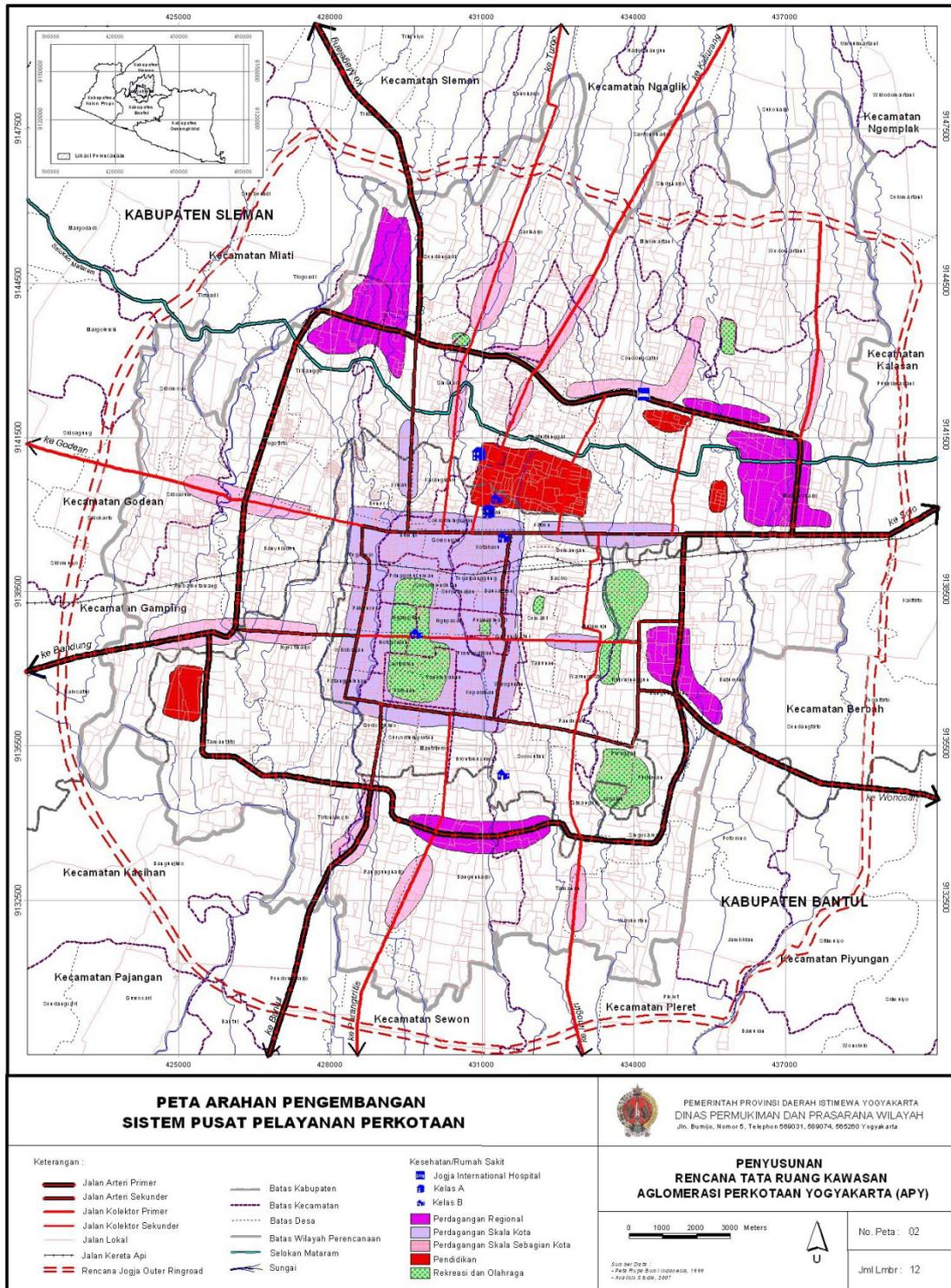
1. Pengembangan kegiatan non pertanian di luar pusat-pusat pelayanan (pola eksternal) diarahkan ke lahan kurang subur (tegalan), terutama ke bagian barat dan barat daya (Sedayu, Gamping, Pajangan, Kasihan)
2. Pengembangan kegiatan non pertanian di lahan perkarangan/permukiman (pola Intensif)
3. Lahan-lahan pertanian produktif diusahakan untuk tetap berfungsi sebagai budidaya pertanian.

Gambar 1.2
Peta Perencanaan Pemanfaatan Ruang Yogyakarta



Sumber: Dinas Permukiman dan Sarana Wilayah Provinsi DIY

Gambar 1.3
Peta Pusat Pelayanan Kota Yogyakarta



Sumber: Dinas Permukiman dan Sarana Wilayah Provinsi DIY

Pembangunan sistem pelayanan kota di wilayah pinggiran kota Yogyakarta sebagai perluasan perkotaan Yogyakarta terlihat dari adanya perluasan kawasan perdagangan, pelayanan budaya/ pariwisata, pelayanan pendidikan dan jasa . Hal ini memberikan pengaruh positif sebagai pendorong laju pertumbuhan kawasan perkotaan Yogyakarta. Perubahan lahan kosong menjadi kawasan terbangun, munculnya lembaga pendidikan luar sekolah, perubahan fungsi rumah menjadi penggunaan untuk jasa.

Pembangunan sarana dan prasana fisik perkotaan Yogyakarta diupayakan untuk menunjang perkembangan kawasan perkotaan Yogyakarta dan daerah sekitarnya. Prasarana dan sarana kota yang termasuk dalam perencanaan yakni sarana transportasi, penyediaan listrik, pengelolaan sampah dan drainase.

Berdasarkan rencana tata ruang dan wilayah tahun 2010 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pembangunan sistem jaringan transportasi dilakukan dengan pengembangan sistem sarana prasarana wilayah yang ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas keseluruhan wilayah daerah dan menembus keterisolasian, menciptakan keterpaduan yang maksimal antara berbagai moda transportasi wilayah dan kota di daerah, serta meningkatkan efisiensi jaringan jalan dengan cara :

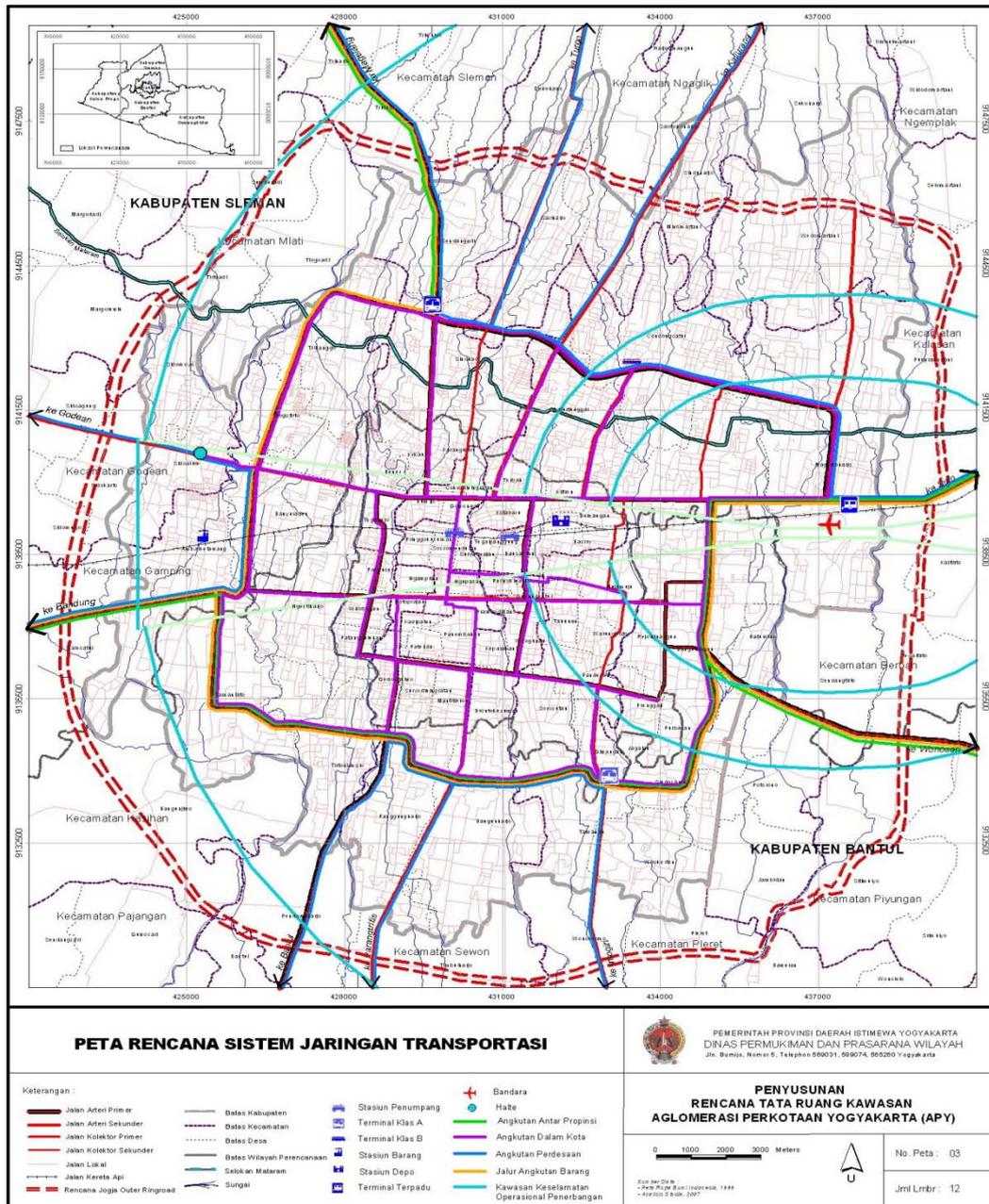
1. Perencanaan jaringan jalan dilakukan dengan peningkatan kualitas sistem jaringan jalan. Peningkatan jalan beserta bangunan pelengkap jalan sesuai fungsinya seperti fly over dan underpass juga termasuk didalamnya.

2. Sistem perencanaan jaringan transportasi.
 - a. jaringan jalan kawasan;
 - b. jaringan jalur kereta api nasional dan perkotaan;
 - c. optimalisasi transportasi umum *Bus Rapid Transport (BRT)* dan *bus feeder*; dan penyediaan jalur sepeda pada jalan perkotaan

Sistem pengelolaan sampah dilakukan dengan sistem terpusat dan sistem setempat. Pengelolaan sistem terpusat di perkotaan Yogyakarta dilakukan oleh dinas kebersihan dan pertamanan kota (DKP). Pelayanan sampah yang berada di wilayah perkotaan diprioritaskan pada jalan utama, perkantoran, kawasan perdagangan, pemukiman padat, pasar, terminal dan rumah sakit. Pelayanan minimal prasarana dan sarana persampahan dilakukan melalui pengumpulan, pemindahan, dan pengangkutan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Pengelolaan Sampah di Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta (Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul) dilakukan di TPA Piyungan dengan sistem *sanitary landfill*.

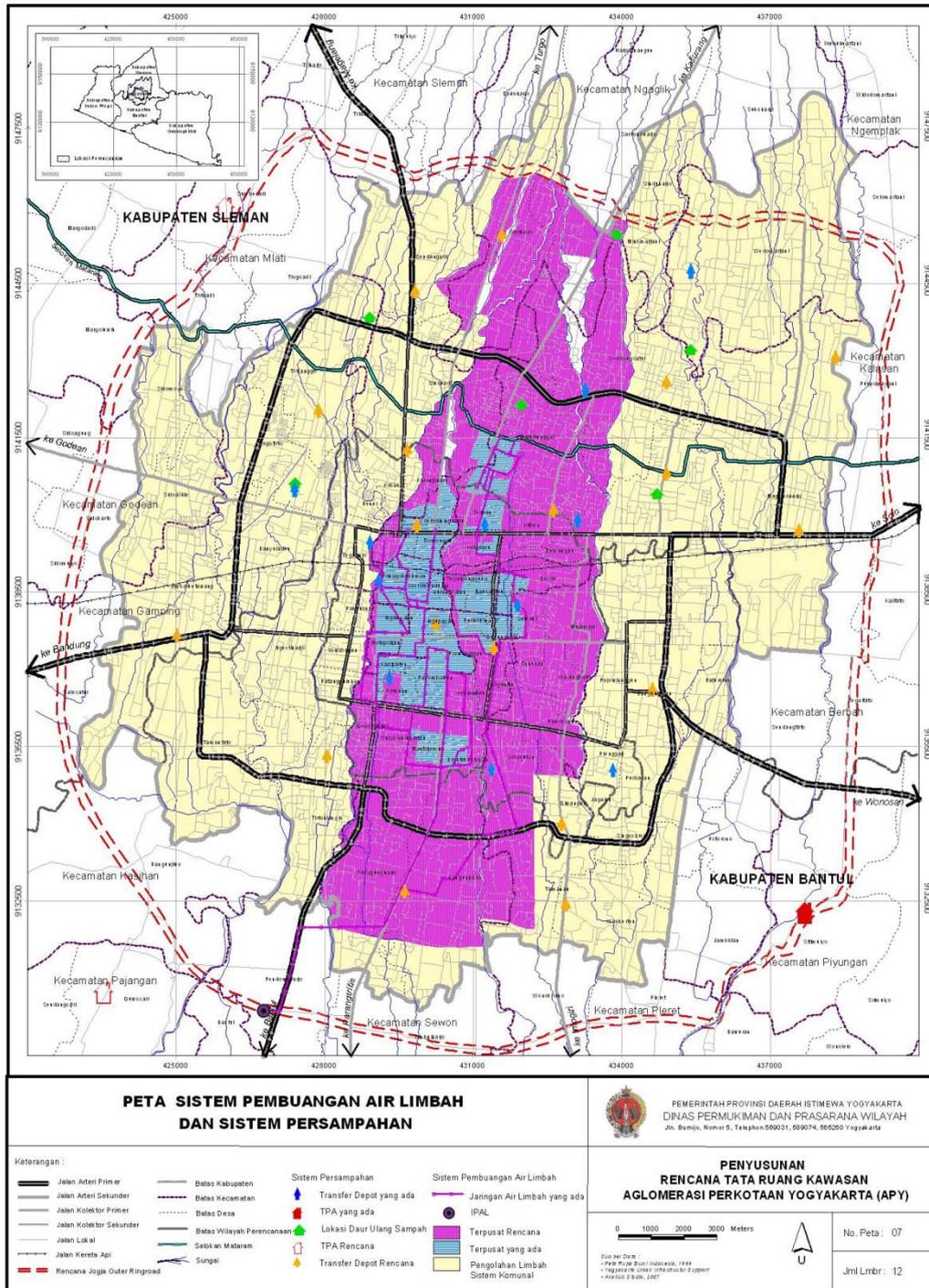
Pengelolaan air limbah sistem terpusat dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) kota, dengan cara penyediaan instalasi pengelolaan air limbah (IPAL), penyediaan jaringan pembuangan utama, pembuangan sekunder dan jaringan ke rumah tangga. Penyediaan jaringan saluran air limbah pada awalnya hanya terpusat di lingkungan kraton ke utara, dengan sistem penampungan limbah di Balai Teknik Kesehatan Lingkungan Ngasem, kemudian sekarang digabungkan dengan IPAL baru yang terpusat di Kecamatan Sewon Bantul dengan cara dialirka ke sungai dengan sistem gelontor.

Gambar 1.4
Peta Sistem Angkutan Kawasan Perkotaan Yogyakarta



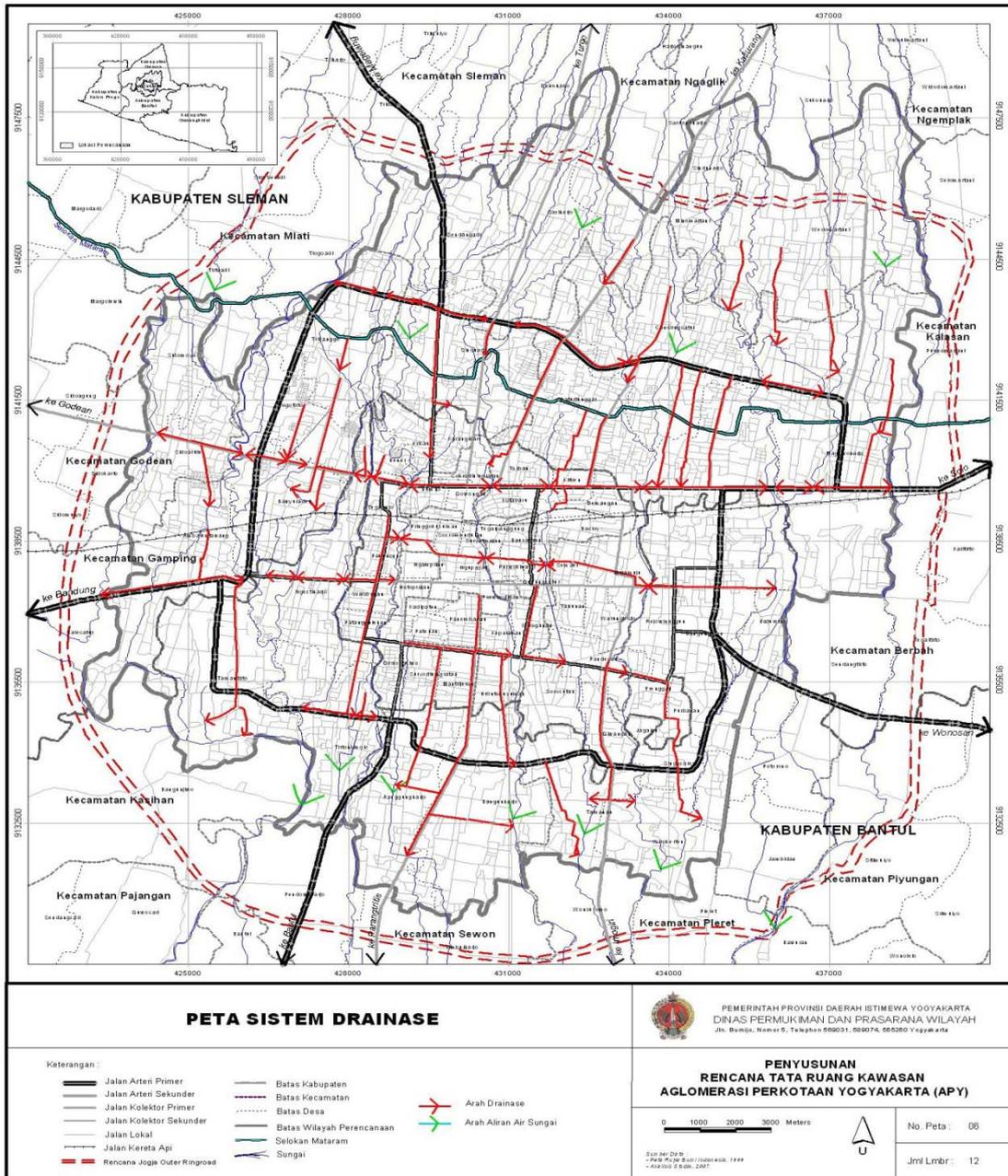
Sumber: Dinas Permukiman dan Sarana Wilayah Provinsi DIY

Gambar 1.5
Peta Perencanaan Pengelolaan Sampah



Sumber: Dinas Permukiman dan Sarana Wilayah Provinsi DIY

Gambar 1.6
Peta Sistem Drainase



Sumber: Dinas Permukiman dan Sarana Wilayah Provinsi DIY

Dengan berbagai fungsi kota yang telah di kerjasamakan di kawasan perkotaan Yogyakarta mengakibatkan adanya polarisasi kota di Provinsi DIY. Dari polarisasi ini sudah semestinya ada perubahan didalam kawasan perkotaan tersebut. Fungsi kota adalah berupa pelayanan yang dapat diberikan oleh fasilitas umum, baik milik pemerintah maupun swasta kepada masyarakat luas selaku pelanggan (*custumor*). Selain itu kota sebagai pusat koleksi dan distribusi pelayanan barang dan jasa dalam bentuk sarana dan prasarana dan pergantian moda transportasi.

Pola perluasan wilayah perkotaan Yogyakarta sebagaimana teori difusi ekspansi dalam difusi keruangan, yaitu proses dimana informasi, material dan lain sebagainya menjalar melalui suatu populasi dari satu daerah ke daerah lainnya. Dalam prosesnya informasi atau material yang didifusikan tetap ada dan kadang menjadi lebih intensif di tempat asalnya, artinya terjadi proses penambahan jumlah anggota baru pada populasi antara periode dua waktu, serta mengubah pola keruangan populasi secara keseluruhan, daerah asal mengalami perluasan. Perubahan-perubahan yang terjadi akibat polarisasi perkotaan ini bisa dilihat dari aspek fisik, sosial maupun ekonomi. Adanya polarisasi kota Yogyakarta menjadi Kawasan Perkotaan Yogyakarta yang mencakup sebagian wilayah Kabupaten Sleman dan sebagian wilayah Kabupaten Bantul, dapat memberikan dampak perkotaan terhadap wilayah yang berbatasan langsung dengan kawasan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, maka diperlukan suatu studi mengenai dampak difusi keruangan sebagai akibat Perkembangan Kawasan Perkotaan Yogyakarta, apakah pemekaran kota hanya terjadi di beberapa titik atau sudah menyeluruh di

dalam Kawasan Perkotaan Yogyakarta. Perluasan informasi dan material dalam hal ini fungsi kota sebagai penentuan kegiatan kota yang ditetapkan berdasarkan hierarki perkotaan dengan indikator berupa kelengkapan fasilitas pelayanan kota (Dirjen Penataan Ruang Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, 2003). Untuk membatasi wilayah penelitian secara fungsional, acuan yang digunakan adalah daerah-daerah yang berada dalam Kawasan Perkotaan Yogyakarta. Pemilihan acuan tersebut semata-mata adalah karena alasan keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga. Namun demikian diharapkan sudah bisa menggambarkan perubahan-perubahan yang terjadi sebagai akibat perluasan wilayah kota Yogyakarta.

Perubahan dalam sistem perkotaan ini bisa dilihat dari aspek fisik seperti penggunaan lahan serta aspek sosial ekonomi dengan indikator ketersediaan fasilitas pelayanan. Dimana fasilitas menurut Jayadinata (1999) adalah:

- Perlindungan , yaitu rumah
- Pelayanan umum yaitu fasilitas kesehatan, keamanan, Komunikasi dan sebagainya.
- Kehidupan ekonomi, yaitu pasar, bank toko, pelabuhan, dan sebagainya
- Kebudayaan misalnya sekolah, kantor pemerintah, bioskop, museum, perpustakaan, dan sebagainya
- Kehidupan Sosial, misalnya lapangan olahraga, tempat rekreasi, dan sebagainya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut

1. Bagaimana perubahan-perubahan fisik yang terjadi didalam kawasan Perkotaan Yogyakarta, yakni bagaimana perubahan tata guna lahan yang terjadi akibat perluasan wilayah perkotaan Yogyakarta?
2. Bagaimana perubahan-perubahan non fisik yaitu sosial ekonomi yang terjadi di kawasan Perkotaan Yogyakarta, dilihat dari mata pencaharian penduduk, ketersediaan fasilitas pelayanan kota seperti pelayanan umum Kesehatan, Transportasi, fasilitas ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui perubahan-perubahan fisik yang terjadi didalam kawasan Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta akibat difusi keruangan pada kawasan perkotaan regional Yogyakarta.
2. Mengetahui perubahan-perubahan sosial ekonomi yang terjadi di dalam Kawasan Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta akibat difusi keruangan pada kawasan perkotaan regional Yogyakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Tambahan informasi dan bahan kajian tentang analisis difusi keruangan pada kawasan perkotaan regional Yogyakarta.

2. Sebagai masukan bagi pengambil keputusan dalam rangka pengembangan wilayah-wilayah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Isi dari pendahuluan mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Telaah Pustaka

Gagasan dalam landasan teori mencakup tentang tinjauan pustaka yang membahas teori digunakan.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai

BAB IV Hasil dan Analisis

Menguraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data dan interpretasi data.

BAB V Penutup

Menguraikan tentang kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan, sekaligus memberikan saran bagi pihak-pihak terkait dalam penelitian guna memberikan kemajuan dari daerah yang diteliti.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Perencanaan Pembangunan Wilayah

Wilayah/Kawasan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional (Sirait, 2009). Berdasarkan pembagian kawasan, terdapat tiga kawasan yakni kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan tertentu yang dijelaskan sebagai berikut (Sirait, 2009):

- a. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
- b. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
- c. Kawasan tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan.

Tarigan (2004) menjelaskan bahwa Perencanaan wilayah adalah perencanaan penggunaan ruang wilayah (termasuk perencanaan pergerakan di dalam ruang wilayah) dan perencanaan kegiatan pada ruang wilayah tersebut.

Perencanaan wilayah merupakan sesuatu hal yang penting. Tarigan (2004) menjelaskan pentingnya perencanaan wilayah yang dikuatkan oleh berbagai faktor antara lain:

- a. Banyak di antara potensi wilayah selain terbatas juga tidak mungkin lagi diperbanyak atau diperbaharui.
- b. Kemampuan teknologi dan cepatnya perubahan dalam kehidupan manusia.
- c. Kesalahan perencanaan yang sudah dieksekusi dilapangan sering tidak diubah atau diperbaiki kembali.
- d. Lahan dibutuhkan oleh setiap manusia untuk menopang kehidupannya.
- e. Tatanan wilayah seklaigus menggambarkan kepribadian dari masyarakat yang berdomisili di wilayah tersebut.
- f. Potensi wilayah berupa pemberian alam maupun hasil karya manusia masa lalu adalah aset yang harus dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam jangka panjang dan bersifat langgeng.

Adapun tujuan dan manfaat perencanaan wilayah adalah sebagai berikut (Tarigan, 2004):

- a. Perencanaan wilayah haruslah mampu menggambarkan proyeksi dari berbagai kegiatan ekonomi dan penggunaan lahan di wilayah tersebut di masa yang akan datang.
- b. Dapat membantu atau memandu para pelaku ekonomi untuk memilih kegiatan apa yang perlu dikembangkan di masa yang akan datang dan dimana lokasi kegiatan seperti itu masih diizinkan.

- c. Sebagai bahan acuan bagi pemerintah untuk mengendalikan atau mengawasi arah pertumbuhan kegiatan ekonomi dan arah penggunaan lahan.
- d. Sebagai landasan bagi rencana-rencana lainnya yang lebih sempit tetapi lebih detail, misalnya perencanaan sektoral dan perencanaan prasarana.
- e. Lokasi itu sendiri dapat dipergunakan untuk berbagai kegiatan, penetapan kegiatan tertentu pada lokasi tertentu haruslah memberi nilai tambah maksimal bagi seluruh masyarakat, artinya dicapai suatu manfaat optimal dari lokasi tersebut.

Dalam konteks wilayah (regional), pembangunan yang ditujukan untuk manusia dan masyarakat yang dimaksud. Oleh karena itu proses pembangunan wilayah secara fisik harus diikuti adanya peningkatan pertumbuhan aktivitas ekonomi dan sosial dari waktu ke waktu, yang disebut mekanisme distribusi kesejahteraan yang efektif dan efisien.

Proses pertumbuhan wilayah adalah produksi dari banyak factor yang sebagian bersifat intern dan sebagian bersifat ekstern. Kekuatan dari dalam yang mempengaruhi pertumbuhan wilayah menurut Hoover (1971) dalam Glasson (1990), dapat dikelompokkan kedalam dua kekuatan yaitu:

1. Kekuatan untuk memperkuat diri sendiri (*self reinforce*)
2. Kekuatan yang membatasi pertumbuhan (*self limit*)

Faktor yang memperkuat akibat adanya keterkaitan antar kegiatan di suatu wilayah sedangkan factor yang membatasi akibat adanya keterbatasan input seperti sumber daya alam, sumber daya manusia dan lain-lain.

2.1.2 Teori Difusi

Secara harfiah difusi berarti pemencara, penyebaran, atau penjalaran, seperti penjalaran berita lewat berbagai media, penyebaran kebudayaan dari satu ras atau bangsa ke ras atau bangsa lain, bahkan penyebaran penyakit merupakan suatu difusi.

Menurut Bintarto (1987), dalam geografi, difusi mempunyai dua macam, yakni difusi ekspansi (*expansion diffusion*) dan difusi relokasi (*relocation diffusion*). Keduanya memiliki arti bertolak belakang.

a. Difusi ekspansi

Merupakan suatu proses dimana informasi, material, dan sebagainya menjalar melalui suatu populasi dari suatu daerah ke daerah lainnya. Dalam proses ekspansi ini informasi atau material yang di-difusikan tetap ada dan bahkan dapat menjadi lebih intensif di daerah asalnya. Hal ini berarti bahwa terjadi penambahan jumlah anggota/pemirsa baru pada populasi antara periode dua waktu (waktu w_1 dan waktu w_2) dan penambahan penambahan anggota baru tersebut mengubah pola keruangan populasi secara keseluruhan. Ini berarti daerah asal informasi mengalami perluasan oleh karena mendapat tambahan anggota baru (recipient) dalam populasi.

b. Difusi relokasi

Merupakan proses yang sama dengan penyebaran keruangan dimana informasi atau material yang di-difusikan meninggalkan daerah lama (tempat asal informasi atau material) dan berpindah atau ditampung di daerah yang baru. Ini berarti

bahwa anggota dari populasi pada waktu w_1 berpindah letaknya dari waktu w_1 hingga waktu w_2 .

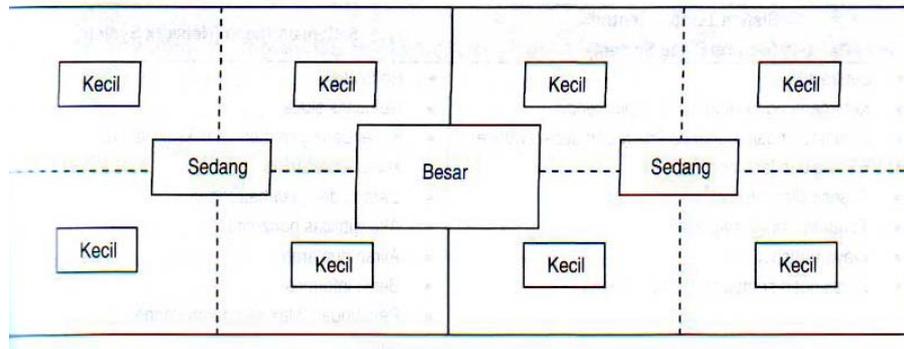
2.1.3 Faktor dan Pola Perkembangan Kota

Menurut Tjahjati (dalam Hestuadiputri,2007), perkembangan kawasan sangat dipengaruhi tingkat pemusatan (aglomerasi) kegiatan sosial ekonomi kota. Pernyataan tersebut cocok dengan kondisi di Indonesia. Di Indonesia, aglomerasi industri di kota menengah dan kecil lebih banyak kepada interaksi perekonomian antara kota dengan kota yang lain maupun kota dengan wilayah pengaruhnya yang secara tidak langsung adalah suatu sistem produksi.

Perkembangan kota secara fisik dapat dilihat dari perkembangan penggunaan lahan yang berbeda disekitar titik pertumbuhan atau adanya nuclei di daerah perkotaan, hal ini mengarah pada ketersediaan lapangan kerja, akomodasi pelayanan, kawasan terbangun dengan mengikuti pola pita, pola radial, pola konsentrik, yang semuanya mengikuti pola jaringan transportasinya. (Harris dan Ullman, 1945)

Pertumbuhan kota-kota ternyata meliputi berbagai faktor yang lebih kompleks daripada sekedar penghematan aglomerasi. Krugman dan para ahli ekonomi perkotaan “ arus utama ” telah begitu terobsesi dengan model kota yang disebut tempat sentral yang monosentrik (*monocentric-central place model of city*). Model hirarki tempat sentral dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Model hirarki tempat sentral



Sumber: O'Sullivan (Kuncoro, 2012).

Gambar tersebut di atas merupakan model Christaller mengenai hierarki tempat sentral (*central place theory*) model ini menjelaskan bahwa perusahaan berorientasi pasar (*market-oriented*) menentukan lokasi berdasarkan pertimbangan akses terhadap konsumen dan model ini digunakan untuk memprediksi jumlah, ukuran, dan jangkauan kota dalam suatu wilayah berdasarkan analisis area pasar (Kuncoro, 2012).

Anthony James Catanese dalam *Urban Planning* 1992; 11 menyatakan pola perencanaan kota berdasar atas aspek fisik, ekonomi, dan sosial politik. Dalam hal ini pertumbuhan wilayah kota ditekankan kepada aspek tata ruang fisik.

Kinerja pelayanan kota tercermin nilai efektif dalam penyediaan prasarana dan sarana kota, baik secara spasial maupun secara fungsional serta pengukuran nilai kualitas yang terdiri dari kemudahan, menyenangkan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan serta kehandalan menurut Sujarto (dalam Suwarno, 2001)

Sedangkan Meier (1989) dan Gunawan (1992) lebih menekankan adanya faktor pendorong dan penarik sebagai penyebab perkembangan kota. Faktor pendorong antara lain jumlah penduduk kota yang bertambah, baik karna urbanisasi maupun pertambahan alami. Faktor penarik adalah harapan adanya lapangan pekerjaan dan tersedianya ruang untuk beraktivitas.

Selanjutnya Reksohadi dan Karseno (1981) melihat konsentrasi berbagai macam kegiatan sebagai penyebab berkembangnya kota. Adapun yang menjadi penyebab terkonsentrasinya pekerjaan dikota yakni keunggulan komparative dengan daerah sekitarnya, skala ekonomi, dan aglomerasi ekonomi.

Perkembangan meliputi perubahan fisik maupun non fisik yang diakibatkan pertambahan jumlah penduduk dan perkembangan penggunaan lahan. Perubahan dalam tata ruang perkotaan karena adanya dukungan dari faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal meliputi kependudukan, pelayanan sosial ekonomi, dan kemampuan pengelola pembangunan dalam menciptakan suatu iklim yang dapat merangsang pertumbuhan kota (Fuhs, dkk, 1994).

Pola perkembangan kota terbentuk sebagai akibat pengaruh adanya aktivitas manusia dan penggunaan lahan yang terus meningkat . Pola perkembangan kota adalah bentuk perkembangan ruang kota yang menggambarkan ukuran, fungsi, serta karakter kegiatan manusia. Alexander (1963) mengemukakan pola perkembangan kota sebagai akibat faktor sosial ekonomi dan geografi sebagai berikut:

- a) Pola menyebar (dispersed pattern). Pola ini terjadi bila kondisi topografi kota dan ekonominya seragam. Bentuk kotanya seperti yang diidealkan oleh

Christaller dalam teori yang terkenal 'Central Place Theory'. Pusat-pusat pelayanan cenderung tersebar didalam wilayah dengan pola heksagonal, dan merupakan pola pelayanan yang efisien.

- b) Pola Sejajar (linear pattern). Pola ini terjadi akibat adanya perkembangan kota disepanjang jalan utama, di sepanjang sungai, atau pantai. Jadi kondisi fisik mempunyai pengaruh yang sangat dominan terhadap pola ini.
- c) Pola gerombol/ merumpun (clustered pattern). Pola ini terjadi pada topografi yang agak datar pada beberapa bagian. Unit-unit pelayanan kota seperti ini terletak saling berdekatan. Tebaran kota ini dianggap sebagai kota besar.

2.1.3.1 Fungsi Kota

Fungsi kota adalah penentuan kegiatan kota yang ditetapkan berdasarkan hirarki perkotaan dengan indikator berupa kelengkapan fasilitas pelayanan kota (Dirjen Penataan Ruang Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, 2003). Menurut Bratakusumah (2003), fungsi kota adalah berupa pelayanan yang dapat diberikan oleh fasilitas-fasilitas umum, baik milik pemerintah maupun swasta kepada masyarakat luas selaku pelanggan (*customer*). Fungsi kota adalah sebagai pusat koleksi dan distribusi pelayanan barang dan jasa dalam bentuk sarana dan prasarana serta pergantian moda transportasi.

Menurut Richardson (2001), dalam teori tempat pusat dinyatakan bahwa fungsi pokok suatu pusat kota adalah sebagai pusat pelayanan, penyuplai barang barang dan jasa sentral seperti jasa eceran, perdagangan, perbankan dan profesional, fasilitas pendidikan, hiburan, kebudayaan dan jasa-jasa pemerintahan.

Menurut Jayadinata (1999), dalam kegiatan sosial ekonomi terdapat suatu istilah, yaitu ambang (*threshold*), yang berarti jumlah minimal penduduk yang diperlukan untuk menunjang supaya suatu fungsi tertentu dapat berjalan lancar. Misalnya suatu macam prasarana yang lebih tinggi fungsinya, atau yang diperlukan oleh jumlah penduduk yang besar jumlahnya (pasar, sekolah, dan sebagainya), harus terletak di wilayah yang jangkauan pelayanannya yang lebih luas, yaitu bukan desa, tapi kecamatan.

Macam-macam fungsi/fasilitas menurut Jayadinata (1999) adalah:

- Perlindungan, yaitu rumah
- Pelayanan umum, yaitu fasilitas kesehatan, dan keamanan, misalnya balai pengobatan, rumah sakit, dan sebagainya.
- Kehidupan ekonomi, yaitu pasar, bank, toko, pelabuhan, dan sebagainya.
- Kebudayaan, misalnya sekolah, kantor pemerintah, bioskop, museum, perpustakaan, dan sebagainya.
- Kehidupan sosial, misalnya lapangan olah raga, tempat rekreasi, dan sebagainya.

Menurut Tarigan (2005), hirarki perkotaan menggambarkan jenjang fungsi perkotaan sebagai akibat perbedaan jumlah, jenis, dan kualitas dari fasilitas yang tersedia di kota tersebut. Perbedaan fungsi ini umumnya terkait langsung dengan perbedaan besarnya kota (jumlah penduduk), sekaligus menggambarkan perbedaan luas pengaruh.

2.1.3.2 Fasilitas yang Dibutuhkan Dalam Suatu Kota

Fasilitas kota selain mampu membentuk struktur fisik kota, juga dibutuhkan sebagai wadah aktivitas baik ekonomi maupun sosial sehari-hari bagi masyarakat setempat (Morris, 2000).

Menurut Rondinelli dan Ruddle (1978), fasilitas pelayanan seharusnya berlokasi di pusat pasar sebuah kota kecil, diantaranya terdiri dari: pasar permanen, kantor pemerintahan, bank, klinik dan rumah sakit kecil, sekolah menengah, jalan arteri, listrik, pipa air, persampahan, transportasi, terminal, lumbung/gudang, fasilitas pemrosesan makanan, telepon, kantor polisi, kantor pos, pemadam kebakaran, dan pelayanan keamanan.

Sedangkan menurut *United Nations* (1979), fasilitas yang harus tersedia diantaranya adalah fasilitas: pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, olah raga, keagamaan, rekreasi, kebudayaan, administrasi, keamanan, komersial, keuangan, pertanian, peternakan, industri, transportasi, pos dan telekomunikasi, perumahan, persampahan, drainase, listrik, serta jalan. Fasilitas harus merinci ruang lingkup pelayanan, jumlah dan kualitas fasilitas untuk masing-masing kelompok umur, kebutuhan ruang, dan lain sebagainya. Pendekatannya dilakukan atas satuan penduduk yang dapat mendukung adanya fasilitas tersebut. Fasilitas yang dibutuhkan dalam suatu kota.

2.1.4 Aglomerasi

Dalam konteks ekonomi geografi, konsep aglomerasi berkaitan dengan konsentrasi spasial dari penduduk dan kegiatan-kegiatan ekonomi (Malmberg dan Maskell, 2001). Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Montgomery

dalam Kuncoro (2002) bahwa aglomerasi adalah konsentrasi spasial dari aktivitas ekonomi di kawasan perkotaan karena 3 penghematan akibat lokasi yang berdekatan (*economies of proximity*) yang diasosiasikan dengan kluster spasial dari perusahaan, para pekerja dan konsumen. Keuntungan-keuntungan dari konsentrasi spasial sebagai akibat dari ekonomi skala (*scale economies*) disebut dengan ekonomi aglomerasi (*agglomeration economies*) (Mills dan Hamilton, 1989). Pengertian ekonomi aglomerasi juga berkaitan dengan eksternalitas kedekatan geografis dari kegiatan-kegiatan ekonomi, bahwa ekonomi aglomerasi merupakan suatu bentuk dari eksternalitas positif dalam produksi yang merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan kota. (Bradley and Gans, 1996).

Ekonomi aglomerasi diartikan sebagai penurunan biaya produksi karena kegiatan-kegiatan ekonomi berlokasi pada tempat yang sama. Gagasan ini merupakan sumbangan pemikiran Alfred Marshall yang menggunakan istilah *localized industry* sebagai pengganti dari istilah ekonomi aglomerasi. Ahli ekonomi Hoover juga membuat klasifikasi ekonomi aglomerasi menjadi 3 jenis (Isard, 1979) yaitu *large scale economies* merupakan keuntungan yang diperoleh perusahaan karena membesarnya skala produksi perusahaan tersebut pada suatu lokasi, *localization economies* merupakan keuntungan yang diperoleh bagi semua perusahaan dalam industri yang sama dalam suatu lokasi dan *urbanization economies* merupakan keuntungan bagi semua industri pada suatu lokasi yang sama sebagai konsekuensi membesarnya skala ekonomi (penduduk, pendapatan, output atau kemakmuran) dari lokasi tersebut. Berbeda dengan pendapat para ahli

ekonomi yang lain, O'Sullivan (1996) membagi ekonomi aglomerasi menjadi dua jenis yaitu ekonomi lokalisasi dan ekonomi urbanisasi. Dalam hal ini yang dimaksud dengan ekonomi aglomerasi adalah eksternalitas positif dalam produksi yaitu menurunnya biaya produksi sebagian besar perusahaan sebagai akibat dari produksi perusahaan lain meningkat.

2.1.5 Analisis Wilayah Pengaruh

Wilayah belakang (*hinterland*) dikatakan sebagai wilayah pengaruh sebuah kota apabila dalam memenuhi kebutuhannya atau menjual hasil produksinya cenderung bergantung kepada kota tersebut, termasuk kebutuhan hidup, pendidikan, kesehatan, atau rekreasi (Tarigan, 2005).

Interaksi kegiatan ekonomi ini dipengaruhi oleh jarak pasar maksimum yang ingin ditempuh oleh penduduk dalam suatu wilayah, jarak ini akan menjadi wilayah pengaruh suatu pasar (kota) dalam melayani penduduk menurut ambang batas. Hal ini dinyatakan Richardson (2001) bahwa hubungan antara kota dengan wilayahnya terjadi akibat kota membentuk wilayah pengaruh yang tergantung pada jarak.

Analisis wilayah pengaruh ini dilakukan untuk mendapatkan sejauh mana wilayah pengaruh dari suatu daerah. Pengaruh dalam hal ini berupa pengaruh secara keruangan, yaitu pengaruh dari pusat-pusat pelayanan sebagai pusat retail. Pusat retail sendiri selain merupakan kota yang berperan sebagai pusat pelayanan dengan orde paling tinggi, juga merupakan kota dengan basis atau sektor dominan pada sektor perdagangan. Penentuan wilayah pengaruh suatu kota pusat retail terhadap wilayah lain.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berbagai studi mengenai aglomerasi dan pertumbuhan kawasan telah banyak dilakukan oleh para ahli ekonomi. Beberapa penelitian ini menunjukkan bagaimana dan dimana Aglomerasi dan pertumbuhan kawasan terjadi.

Tahun 2000 Mudarajad Kuncoro melakukan penelitian terhadap aglomerasi perkotaan dengan daerah pengamatan wilayah Yogyakarta, dengan menggunakan analisa identifikasi pertumbuhan penduduk, identifikasi wilayah perkotaan dengan melihat konsentrasi spasial. Hasil dari penelitian ini aglomerasi terjadi di kota Yogyakarta dan cenderung berkembang kearah utara (Kabupaten Sleman).

Suwarno 2001, Melakukan studi tentang Kajian Kawasan Tumbuh Cepat Wilayah Perkotaan yogyakarta, dengan melakukan identifikasi pada faktor perkembangan kota yakni, perkembangan jumlah penduduk perkotaan, Identifikasi ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas ekonomi, identifikasi ketersediaan sarana dan prasarana perkotaan, identifikasi pengendalian lingkungan dan identifikasi pemanfaatan lahan . Hasil dari penelitian ini adalah kawasan tumbuh cepat perkotaan yogyakarta keberadaanya disebabkan oleh aspek internal yaitu berbagai aspek dasar yang berada di kawasan tersebut, Kawasan tumbuh cepat yang terjadi dipengaruhi oleh beberapa hal seperti tingkat aksesibilitas, nilai perubahan lahan dan sebagainya.

Kuncoro (2003), melakukan studi tentang dinamika spasial industri manufaktur di Indonesia dengan tahun pengamatan 1976 sampai 1999. Studi ini menegaskan bahwa aglomerasi industri besar dan sedang sangat berhubungan dengan konsentrasi perkotaan di Jawa. Aglomerasi industri manufaktur dan

populasi yang besar telah berkembang di Jabotabek dan Greater Bandung di bagian barat. Daerah-daerah tersebut menawarkan daya aglomerasi yang kuat, yang pada akhirnya akan menarik baik orang maupun perusahaan-perusahaan.

Pada tahun 2007 Didi nuryadin dan Jamani Sodik meneliti kaitan antara aglomerasi dan pertumbuhan ekonomi dengan tehnik analisa indeks Ballasa, regresi dengan Metode GLS dengan Variable dependent PDRB dan variable independent Aglomerasi, laju angkatan kerja, laju oppenes dan Human Capital. Dimana hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variable Aglomerasi memiliki nilai koefisien paling tinggi dibandingkan dengan variable independent yang lain.

Tabel 2.1.

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Variable	Teknik Analisis	Hasil penelitian
1	Dr. Mudrajad Kuncoro SE, M.soc.Sc (2000)	Aglomerasi Perkotaan di DIY Apa, Dimana, dan Mengapa?	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi kecenderungan Aglomerasi di DIY - Aglomerasi Penduduk dan Aglomerasi Industri 	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi Pertumbuhan penduduk - Identifikasi wilayah perkotaan dengan melihat konsentrasi spasial 	<ul style="list-style-type: none"> -Aglomerasi terjadi di kota Yogyakarta dan cenderung berkembang kearah utara (Kab. Sleman) -Perkembangan Aglomerasi di DIY membentuk aglomerasi penduduk pada saat yang bersamaan
2	Mudrajad Kuncoro dan Amini Hidayati (2003)	KONSENTRASI GEOGRAFIS INDUSTRI MANUFAKTUR DI <i>GREATER</i> JAKARTA DAN BANDUNG PERIODE 1980-2000: MENUJU SATU DAERAH AGLOMERASI?	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi aglomerasi di greter Jakarta bandung - Data industry (data tenaga kerja dan nilai tambah) 	-SIG	daerah aglomerasi pada tahun pertama pengamatan hanya ditemukan di daerah metropolitan utama. Dua dekade kemudian aglomerasi telah menyebar luas. Namun demikian pola penyebaran aglomerasi IBM hanya bias di sekitar daerah-daerah metropolitan utama, yaitu daerah yang dikenal sebagai <i>Extended Metropolitan Region</i> seperti Jabotabek, Kerawang, Purwakarta, dan Serang.
3	Didi Nuryadin, Jamani Sodik,	Aglomerasi dan Pertumbuhan ekonomi: Peran karakteristik	Variable Dependent PDRB Variable Independent	-Indeks Balassa -regresi dengan Metode GLS	variabel aglomerasi mempunyai nilai koefisien yang paling tinggi dibandingkan dengan variabel independen yang lain, yaitu laju angkatan kerja, tingkat inflasi, laju <i>Openness</i> , dan tingkat

	Dedi Iskandar (2007)	regional Indonesia di	<ul style="list-style-type: none"> -Aglomerasi -Laju Angkatan Kerja -Laju Inflasi -Laju Oppenes - Human Capital 		<p>pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa aglomerasi (pengelompokkan industri) jika lebih dikembangkan lagi bisa memberikan kontribusi yang cukup besar dalam mendukung meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi daerah. Variabel laju <i>Openness</i> memiliki arah yang konsisten dengan teori meskipun dengan koefisien (signifikan secara statistik) yang relatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa variabel ekspor netto bisa lebih berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional jika daerah bisa lebih meningkatkan ekspornya. Variabel laju inflasi yang merupakan indikator kestabilan perekonomian suatu daerah sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan arah yang negatif. Untuk itu daerah perlu menjaga agar inflasi bisa terkendali. Lebih lanjut dalam studi ini, pendekatan <i>fixed effect</i> lebih baik dibanding <i>random effect</i> dalam menjelaskan perilaku pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia.</p>
4	Suwarno (2001)	Kajian Terhadap Terjadinya Kawasan Tumbuh Cepat wilayah perkotaan Yogyakarta	<p>Variable</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.perkembangan jumlah penduduk perkotaan, 2.Identifikasi ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas ekonomi, 3.identifikasi ketersediaan sarana 	<ul style="list-style-type: none"> -Analisis skalogram - Indeks sentralis Berbobot -Skala Guttman 	<p>kawasan tumbuh cepat perkotaan yogyakarta keberadaanya disebabkan oleh aspek internal yaitu berbagai aspek dasar yang berada di kawasan tersebut, Kawasan tumbuh cepat yang terjadi dipengaruhi oleh beberapa hal seperti tingkat aksesibilitas, nilai perubahan lahan, pertumbuhan sarana dan prasarana.</p>

			dan prasarana perkotaan, 4. identifikasi pengendalian lingkungan dan 5. identifikasi pemanfaatan lahan		
--	--	--	--	--	--

2.3 Kerangka Pemikiran

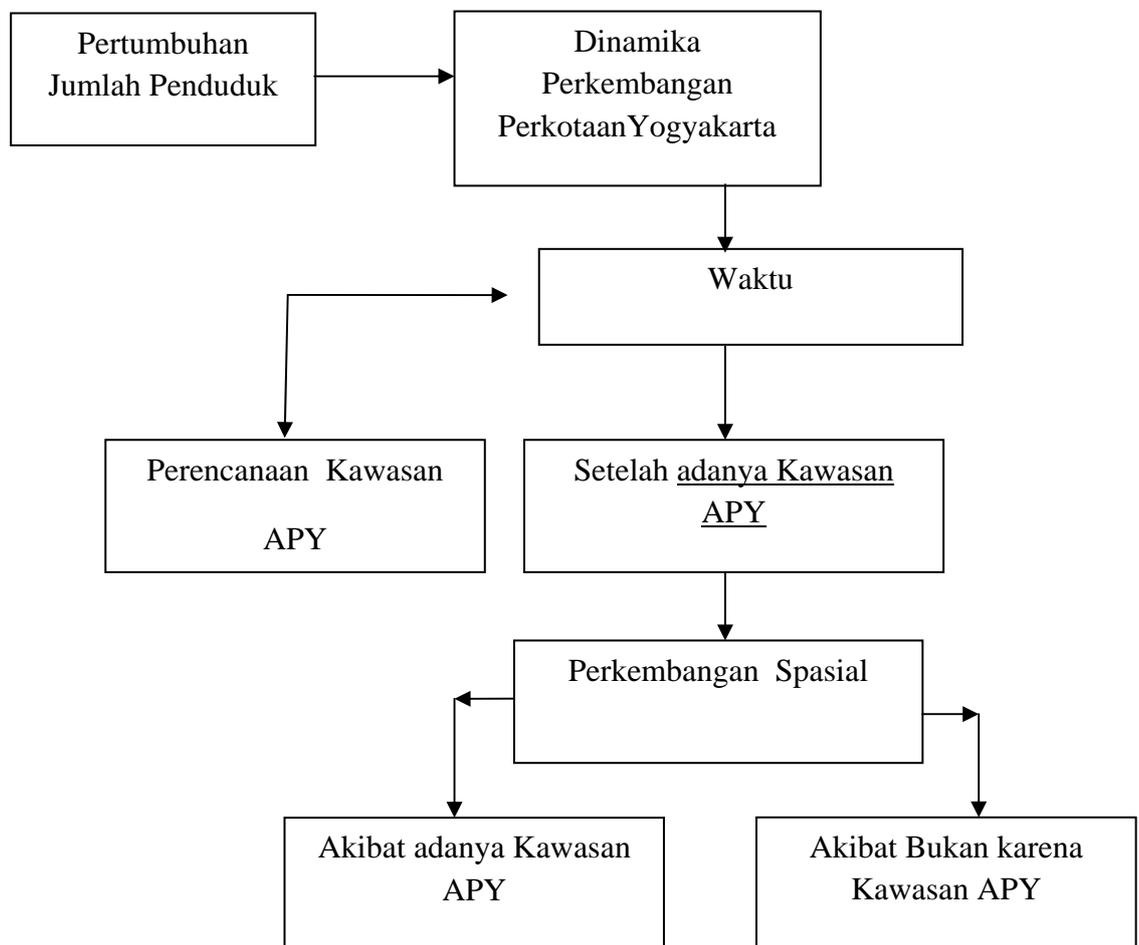
Pembangunan fisik kota Yogyakarta yang terus menerus dilakukan seiring dengan perkembangan penduduk perkotaan di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menyebabkan kebutuhan ruang yang terus meningkat. Untuk mengatasi hal ini pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta membentuk suatu perencanaan Kawasan Perkotaan Yogyakarta, yang sebelumnya telah dilakukan berbagai studi mengenai arah perluasan Kawasan Perkotaan Yogyakarta.

Dalam dokumen perencanaan yang diatur pada Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DI Yogyakarta No. 10 Tahun 2005, Pemerintah Yogyakarta telah menentukan kawasan yang termasuk APY (Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta). Pada Pasal 41c, Kawasan APY mempunyai fungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang mencakup wilayah kota Yogyakarta dan sebagian wilayah kecamatan Kasihan, Sewon, Banguntapan di wilayah Kabupaten Bantul serta Kecamatan Depok, Ngemplak, Ngaglik, Mlati dan Gamping di wilayah Kabupaten Sleman. Wilayah ini merupakan wilayah pengembangan sistem pelayanan Kota Yogyakarta. Penetapan Kawasan Perkotaan Yogyakarta kemudian diintegrasikan dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 2 tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Perkembangan wilayah perkotaan Yogyakarta yang termasuk APY ini tentunya dapat menimbulkan perpindahan penduduk serta peningkatan aktifitas pada kawasan tersebut maupun jalur-jalur menuju kawasan tersebut. Pertumbuhan-pertumbuhan baik pada kawasan APY maupun di sekitaran kawasan

tersebut tentunya memiliki dampak baik positif maupun negatif. Dampak positifnya yakni penduduk yang tinggal di kawasan perkotaan Yogyakarta dan sekitarnya menjadi semakin maju karena fasilitas-fasilitas perkotaan menjadi semakin banyak dan semakin beragam.

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran



Gambar di atas menjelaskan bahwa pertambahan penduduk di kota Yogyakarta diikuti dengan dinamika aktivitas perkotaan yang selanjutnya dalam

perencanaan wilayah provinsi DIY dibuat konsep Rencana Kawasan Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta . Penjalaran fisik / area terbangun yang berciri kekotaan, membentuk simpul-simpul kegiatan dalam Kawasan perkotaan Yogyakarta.

Pada tahap selanjutnya, adanya proses difusi dari pusat dominan, keuntungan industrialisasi disebarkan ke kota- kota sekitarnya sehingga memungkinkan kemunculan pusat-pusat yang baru. Pusat-pusat kegiatan yang pada awalnya berpusat ditengah Centaral Basic Development Kota Yogyakarta pada akhirnya memberi prioritas berkembangnya daerah-daerah pinggiran karena daerah pinggiran juga didukung oleh adanya jaringan jalan yang memadai, pusat-pusat kegiatan masyarakat seperti perguruan tinggi, pusat pusat perniagaan. Keberadaan fasilitas-fasilitas inilah yang dapat memicu timbulnya aktifitas lain yang pada akhirnya akan menarik banyak orang ke daerah pinggiran ini. Adanya proses difusi keruangan pada Kawasan Perkotaan Yogyakarta ini dapat dilihat melalui indikator perubahan fisik seperti fungsi lahan dan bangunan serta fungsi ekonomi yang tumbuh berkembang serta data, kependudukan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Dasar

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran dan menganalisis secara terperinci fenomena penyebaran keruangan yang ada. Menurut Soerachmand (1975) dan Amaluddin (1987), penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan realita sosial yang kompleks dengan menerapkan konsep-konsep teori yang telah dikembangkan oleh ilmuwan sosial.

Dalam penelitian ini metode eksploratif dimaksudkan untuk melihat pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya konsep Aglomerasi perkotaan Yogyakarta terhadap kawasan didalamnya. Eksplorasi fisik dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap perkembangan pemanfaatan lahan yang digunakan, serta pemanfaatan fasilitas perkotaan yang ada di dalam kawasan Perkotaan Yogyakarta. Adapun untuk memperkuat temuan dilakukan survey singkat dan wawancara seperlunya dengan penduduk dan pengguna kawasan penelitian

3.1.1 Variabel penelitian

Dari kajian teori diatas dapat ditemukan variable-variable untuk mengkaji penelitian. Aspek-aspek yang diteliti dalam penelitian ini yakni :

1. Dampak fisik yang ditimbulkan sebagai pengaruh adanya kawasan perkotaan Yogyakarta dengan variable yang diteliti yaitu
 - Penjalaran fisik/ area terbangun

- Tipologi
2. Dampak sosial ekonomi sebagai pengaruh adanya kawasan perkotaan Yogyakarta dengan variabel:
 - Aktivitas ekonomi
 - Karakteristik penduduk

3.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang akan digunakan bersumber dari:

a. Data Primer

Data primer meliputi data kondisi fisik, sosial, dan ekonomi yang secara visual diperoleh dari hasil pengamatan langsung di lapangan. Hasil pengamatan disajikan dalam bentuk peta-peta, foto lingkungan dan didukung dari informasi dari penduduk, perencana, dan pihak pembuat kebijakan.

b. Data Sekunder

Data sekunder, meliputi kondisi aktual Provinsi DIY pada umumnya dan Kawasan Perkotaan Yogyakarta pada khususnya. Data terdiri dari elemen fisik dan non fisik mencakup kondisi alamiah, peta perencanaan, perkembangan tata guna lahan, sebaran lahan terbangun, serta kependudukan.

Adapun data-data primer didapat dari pengamatan langsung pada kawasan studi. Data sekunder didapat dari dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pihak berwenang seperti Bappeda Tk. I. Provinsi DIY, Badan Pertanahan Nasional Kanwil Yogyakarta dan Dinas Pekerjaan Umum

Provinsi Yogyakarta. Sumber lain yang juga dapat dimanfaatkan sebagai data sekunder dapat berupa studi literatur, referensi, artikel-artikel.

3.3 Metode Analisis

3.3.1 Tipe Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat diskriptif kualitatif, berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari kajian kepustakaan dan studi lapangan. Perangkat yang dipakai untuk menghimpun data-data di lapangan disusun berdasarkan pengamatan lapangan. Metode yang digunakan dalam menghimpun dan menganalisis data adalah metode eksploratif.

Dalam penelitian ini metode eksploratif dimaksudkan untuk melihat penjarangan fisik yang terjadi di Kota Yogyakarta ke daerah sekitarnya. Eksplorasi fisik dilakukan dengan mendata perkembangan pemanfaatan lahan yang timbul sebagai dampak perluasan kawasan perkotaan Yogyakarta. Adapun untuk menguatkan temuan dilakukan survey ringkas dan wawancara seperlunya dengan penduduk dan pengguna kawasan penelitian. Pengamatan dimaksudkan mengidentifikasi perubahan-perubahan fisik sosial ekonomi yang terjadi .

Data yang diperoleh dengan metode penelitian dokumenter dapat bersifat kualitatif maupun kuantitatif, selanjutnya dianalisis secara komparatif menurut indikator yang ditetapkan dengan informasi yang diperoleh. Metode analisis kualitatif ini kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan Metode berpikir deduktif, yaitu didasarkan pada hal-hal bersifat umum kemudian disimpulkan secara spesifik / khusus.

3.3.2 Alat Penelitian

Alat penelitian yang digunakan dalam memahami kejadian yang terjadi untuk mengkonstruksikan kajian adalah sebagai berikut :

- a) Peta perencanaan kawasan perkotaan Yogyakarta tahun 2005 dan peta penggunaan lahan serta foto-foto keadaan saat ini.
- b) Data dan informasi yang berkenaan dengan perkembangan Kawasan Perkotaan Yogyakarta
- c) Hasil Eksplorasi di lapangan